

**STRATEGI KOMUNIKASI PARTISIPATIF PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN RI-PNG**

**PARTICIPATORY COMMUNICATION STRATEGY VILLAGE GOVERNMENT IN
EMPOWERING BORDER COMMUNITIES RI-PNG**

Samdar Rery^{1*}, Hamim Mustofa², Busyairi Ahmad³, Nahria⁴.

^{1,2,4}Universitas Muhammadiyah Papua

³Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

*Korespondensi: sam.rery@umpapua.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 26-08-2024)

(Ditelaah oleh Dewan Redaksi: 06-09-2024)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 16-10-2024)

ABSTRACT

Mosso is a village located in between Indonesia - Papua New Guinea border. It is often known for its difficulty. In reaching government's efforts to empower the community through the use of village funds can make a positive contribution to the progress of the Mosso Village community. So it is necessary to develop communication strategy to empower the community by utilizing of village fund allocation that can increase community participation. The theory used in studying the results of this research is the development communication theory. The methods used in this study are descriptive qualitative research and data analysis techniques using Miles and Huberman models, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verifying (verification). The results of this study show that the village government's communication strategy has not been maximized in increasing community participation through utilizing empowerment programs, this is marked by 1). The communication that has occurred so far has been more monologic/directive in nature, communication has not led to a form of dialogue with the community, 2). The weak process of supporting the empowerment program consistently by the village government, starting from the planning, implementation, to evaluation stages.

Keywords: Communication strategy; Border communities; Empowerment program.

ABSTRAK

Kampung Mosso adalah kampung yang terletak di daerah perbatasan antara Indonesia – Papua New Guinea. Kampung ini sering diklasifikasi masyarakat Papua sebagai daerah yang sulit dijangkau. Upaya pemerintah memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat Kampung Mosso. Diperlukan adanya strategi komunikasi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Teori yang digunakan dalam mengkaji hasil penelitian ini adalah teori komunikasi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/verifying* (verifikasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintahan kampung belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui memanfaatkan program pemberdayaan. Hal ini ditandai dengan: 1). Komunikasi yang terjadi selama ini lebih bersifat monologis/arahan, Komunikasi belum mengarah ke bentuk dialogis dengan masyarakat, 2). Lemahnya proses pendampingan program pemberdayaan secara konsisten oleh pemerintah kampung, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Keywords: Masyarakat perbatasan; Pemberdayaan program; Strategi komunikasi.

Samdar Rery, Hamim Mustofa, Busyairi Ahmad, Nahria. 2024. Strategi Komunikasi Partisipatif Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan RI-PNG.

PENDAHULUAN

Menciptakan kemandirian masyarakat adalah salah satunya melalui kegiatan penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan dampak pada perubahan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif pada pembangunan daerah (Setyowati et al., 2019a). Namun upaya pemerintah memberdayakan masyarakat di daerah terpencil melalui alokasi dana desa untuk meningkatkan keberdayaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat tidak seperti yang diharapkan seharusnya proses pembangunan di daerah terpencil melalui alokasi dana desa perlu diberdayakan masyarakat untuk menciptakan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat (Basita Ginting Sugihen, 2017).

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan tentu berkaitan dengan kondisi masyarakat di mana masyarakat harus dilihat dari tingkat kesiapannya dalam hal pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada sehingga mempermudah dalam pelaksanaan program pemberdayaan (Nugraha et al., 2019). Dalam kaitan komunikasi Pembangunan, perlu adanya peran fasilitator (pemerintah) untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat (Damsuki, 2019). Di Papua tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan di daerah yang sulit jangkauan atau jauh dari akses informasi, masih jauh dari harapan. Komunikasi pemberdayaan di Papua untuk pengembangan energi sosial tergolong

sangat rendah, disebabkan tingkat komunikasi partisipatif rendah melalui komunikasi dialog dengan masyarakat (Sulistiani et al., 2017).

Pelaksanaan pembangunan di daerah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi, khusus Papua, yang sejalan dengan UU Desentralisasi Daerah yakni UU nomor 32 tahun 2004 dan UU 33 Tahun 2004 tentang desentralisasi fiskal. Dengan adanya UU tersebut, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perhatian pada pembangunan di Papua (Basita Ginting Sugihen, 2017).

Pada kenyataannya di daerah Papua, terutama di daerah terpencil seperti daerah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, hanya terlaksana sebagai syarat terselenggaranya kegiatan pemerintah. Akan tetapi, tidak terfokus pada penguatan kemandirian masyarakat. Dari sini kegiatan pembangunan pada masyarakat belum memberikan dampak pada peningkatan sumberdaya manusia, menurut (Veplun, 2019), menjadi permasalahan di sini adalah berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu permasalahan yang dapat memberikan dampak pada kelancaran kegiatan pembangunan di mana komunikasi pembangunan sangat penting dalam mentransformasikan pesan yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Hal mendasar adalah berkaitan antara komunikator (pemerintah) dengan komunikan (masyarakat) perlu dipahami bahwa komunikasi instruktif dari pemerintah tidak semuanya dipahami oleh masyarakat.

Di sini fungsi komunikasi pemerintah (pemerintah kampung) sangat penting untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat (Indardi, 2016), pemerintahan desa sebagai eksekutor

program pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah merupakan posisi yang sangat strategis, maka tentu pemerintah desa mengalami dan tahu persis permasalahan pembangunan di masyarakat (Fikruzzaman Daden, n.d.). Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu adanya peran aktif pemerintah kampung atau desa.

Menurut Sulistiani (2017), komunikasi antara masyarakat dengan fasilitator (pemerintah kampung) dengan masyarakat hanya bersifat instruktif, tidak partisipatif. Masyarakat Kampung Mosso perbatasan RI-PNG dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa tidak memberikan dampak pada kemandirian masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Rakhmadani, 2021a mengatakan bahwa fungsi program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa adalah cara pemerintah mengatasi kemiskinan pada wilayah terpencil. Melalui program pemberdayaan, bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memajukan ekonomi masyarakat pada daerah terpencil. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Partisipatif Kepala Kampung dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Mosso Perbatasan RI-PNG. Fokus pada penelitian pada berkaitan dengan strategi komunikasi kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa.

MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data dengan metode *participatory Rural Appraisal* (RPA) (Rakhmadani, 2021b) atau

cara melihat masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan program, bukan sebagai objek pembangunan, yang mana prinsip dari metode RPA adalah masyarakat dianggap sebagai subjek dalam pelaksanaan program pemberdayaan, bukan sebagai objek dari program pemberdayaan. Pihak luar diposisikan sebagai fasilitator program. Sementara pemerintah sebagai fasilitator program akan bersama-sama mewujudkan keberhasilan program.

Adapun tahapan dalam metode pengumpulan data ini adalah meliputi: *Pertama*, observasi. Tim melakukan pengidentifikasi masalah program yang dirancang atau yang direncanakan desa untuk menemukan pintu masuk dalam mengeksplorasi apa yang menjadi benang kusut pada masalah yang diteliti, yang dimana observasi merupakan cara pengumpulan data yang dikerjakan dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, sehingga dihasilkan sebagai sebuah jawaban terhadap fenomena yang sedang diteliti (Kurli et al., 2024); *Kedua*, melakukan wawancara dengan narasumber terpilih, terutama pada pemerintahan desa/kampung, mulai dari kepala kampung, hingga perangkat desa yang memiliki jabatan struktur organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan, dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pelaksana program pemberdayaan. Adapun dalam pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan pihak yang dipilih berdasarkan kompetensi mereka yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemberdayaan; *Ketiga*, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk meneliti dokumen, atau arsip kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintahan desa (Juditha, 2020; Pariwisata Budaya, n.d.).

Teknik analisis data dengan model triangulasi. Data diteliti dicek keabsahan data dalam sebuah penelitian, menurut Juditha, 2020; Yasir, 2021, di mana data diferivikasi dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Membandingkan data dari tiga teknik pengambilan data tersebut dapat dianalisis sesuai dengan fokus penelitian atau sesuai objek kajian pada penelitian (Mustaqbirin et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kampung sangat ditentukan oleh komunikasi partisipatif kepala kampung (kepala desa) yang memiliki kewajiban dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di kampung. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di kampung (desa) terletak pada cara komunikasi kepala kampung berkomunikasi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan tidak terlalu produktif dalam pelaksanaan kegiatan di mana masyarakat belum memahami pentingnya program pemberdayaan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Hasil kutipan wawancara dengan Bapak Carles Wefafoa, *“Torang masyarakat di sini ajak kerja bakti sosial dorang malas datang, tetapi kalau pembagian dana desa mereka datang semua menuntut hak”*. Fakta lain yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa tidak direncanakan dengan baik oleh aparat desa/kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kampung Mosso Biliam Wepa Voa, bahwa *kami sudah merencanakan program untuk masyarakat melalui musrembang kampung dan distrik. Akan tetapi program kami belum berjalan dengan baik karena belum mendapat*

dukungan sepenuhnya oleh masyarakat yang mana masyarakat masih terkontaminasi dengan konflik jabatan struktural di kampung ini (Mosso) sudah kami lakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas permasalahan di kampung Mosso. Tetapi masyarakat banyak yang belum sependapat dengan kami dan kami terus melakukan proses pembangunan walaupun banyak yang belum memberikan dukungan, baik partisipasi langsung maupun yang tidak berpartisipasi langsung.

Dari penjelasan di Biliam Wepa Voa, menunjukan ada benang kusut yang belum diungkapkan, ini menunjukan bahwa ada konflik politik kelompok dalam masyarakat Kampung Mosso yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hal ini dapat memberikan dampak pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Wepa Voa, bahwa program yang sudah lakukan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat Mosso, dan pembentukan kelompok tani. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi penghambat adalah masalah partisipasi warga. Pemerintahan kampung terus membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Kepala kampung menjelaskan proses kerja mereka dalam melaksanakan program pemberdayaan dimulai mereka melakukan pertemuan dengan masyarakat dan mengajak masyarakat memberikan masukan tentang program pemberdayaan. Setelah itu, mereka menetapkan atau memutuskan bersama. Program yang diputuskan itu disesuaikan dengan anggaran karena setiap dana desa itu tidak hanya berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Maka dilakukan program yang sesuai dengan postur anggaran yang ada.

Akan tetapi, setiap program yang dilaksanakan pemerintah kampung dalam pemerintahan desa. Tentu perlu melibatkan

masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan sebagaimana sesuai dengan hasil kutipan wawancara dengan Wepa Voa, *“kami lakukan kegiatan pembangunan jalan, itu kami melibatkan masyarakat dalam mengerjakan kegiatan tersebut, seperti kegiatan pembangunan kantor desa yang baru. Itu juga kami melibatkan masyarakat. Selama ini kami tidak mengambil pekerja dari luar untuk mengerjakan pembangunan jalan dan pembangunan kantor desa. Ada proyek pembangunan rumah rakyat yang sudah dibangun beberapa unit. Itu semua pekerja dari masyarakat lokal yang diambil dari masyarakat sini.*

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, masyarakat diberikan bantuan pendanaan untuk masyarakat. Akan tetapi, anggaran untuk kegiatan ini belum terserap dengan baik karena masyarakat masih belum memahami dengan baik proses pengajuan di mana proses pengajuan dana itu melalui proses administrasi. Sementara masyarakat banyak belum memahami cara mengusulkan. Sebagaimana kutipan wawancara dengan ketua dan wakil ketua badan usaha milik kampung (Bamuskam) Bobi dan Abner Rehwi, *masyarakat di sini banyak belum mengerti cara mengajukan bantuan pemberdayaan. Pengajuan dana itu harus dengan proposal. Ini aturan jadi kami menyesuaikan saja dengan aturan dari proses pengajuan anggaran pemberdayaan yang tentu berkaitan dengan administrasi. Sementara warga keterbatasan pengetahuan tentang administrasi sehingga proses pelaksanaan program pemberdayaan menjadi suatu masalah bagi masyarakat Mosso.*

Interaksi antara fasilitator/pemerintah kampung/desa dengan masyarakat maupun sebaliknya sering terjadi miskomunikasi di antara kedua pihak. Masyarakat sering mengeluhkan terkait kurangnya mendapat informasi dari pemerintahan kampung, dan kesulitan menemui kepala kampung, lebih

banyak masyarakat menyalurkan aspirasi mereka kepada perangkat desa dalam hal ini bawahan kepala kampung, seperti kepala bamuskam dan kantor desa jarang dibuka sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapat pelayanan. Hasil wawancara menunjukkan dengan masyarakat bahwa untuk bertemu dengan perangkat kampung sangat sulit yang di mana kepala kampung banyak melakukan aktivitas di kota dan jarang ke kampung. Sementara kebutuhan aspirasi masyarakat harus disampaikan kepada perangkat kampung yaitu kepala kampung. Sementara komunikasi masyarakat melalui perangkat kampung lainnya juga sering terjadi miskomunikasi aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti kepada kepala kampung.

Masyarakat Mosso pada umumnya belum diberdayakan secara maksimal melalui pemanfaatan dana desa dan dana desa belum diarahkan sepenuh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga memberdayakan masyarakat pada sektor pendidikan dan usaha mikro kecil pada masyarakat belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Mosso. Padahal ada Bamuskam yang dikelola oleh aparat kampung untuk meningkatkan produktivitas pemberdayaan masyarakat. Kemampuan partisipasi masyarakat masih dipengaruhi dari setiap kejelasan informasi kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah kampung sehingga masyarakat cenderung berpartisipasi hanya karena ada motif hasil dari setiap kegiatan di kampung berdampak jangka pendek untuk kebutuhan masyarakat Mosso.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dan keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat sehingga dalam meningkatkan pembangunan pada suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Di mana masyarakat sebagai aktor utama mendorong proses pembangunan sehingga

dibutuhkan partisipatif dari masyarakat dalam proses pelaksanaan Pembangunan (Ramainim Saragih dan Sarwititi Agung, 2018). Titik utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah keefektifan komunikasi oleh seorang pemimpin untuk menciptakan iklim komunikasi yang baik dalam mendorong atau menginspirasi masyarakat lewat komunikasi pembangunan dari pemimpin.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan program pemberdayaan melalui pemanfaatan dana desa, tentu pihak pemerintah atau fasilitator berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dengan berbagai pendekatan agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun persoalan di sini adalah berkaitan dengan prosedural yang terlalu birokratis. Sementara masyarakat Mosso pada umumnya tidak berpendidikan sehingga menjadi penghambat. Di lain sisi, seharusnya pemerintah desa/kampung bisa membuat kebijakan/keputusan dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat Mosso.

1. Pelibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan

Proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan belum dilakukan maksimal oleh pemerintahan desa kepala desa menjadi persoalan mendasar adalah berkaitan dengan proses komunikasi penyampaian pesan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik oleh kepala kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dikarenakan bisa saja proses komunikasi tidak sesuai perencanaan dan yang juga berkaitan dengan kemampuan dalam mengkomunikasikan program sampai pada tingkat teknis pun tidak tersampaikan dengan baik sehingga warga tidak dapat memahami apa yang disampaikan serta apa tujuan dan manfaat

dari program pemberdayaan itu untuk peningkatan daya partisipasi masyarakat. Sebagaimana strategi komunikasi merupakan konsep yang digunakan untuk mengubah perilaku manusia sesuai yang diharapkan dan tidak mudah untuk dilakukan tanpa memahami keadaan sosiologi pada masyarakat. Maka penanganan komunikasi perlu kehati-hatian pada saat proses interaksi. (Apris Martin, 2022).

Proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik berkaitan dengan penawaran ide maupun gagasan dari masyarakat jarang dilakukan oleh pemerintahan desa, dikarenakan masyarakat pada umumnya tidak berpendidikan sehingga awam dalam proses pengelolaan program pemberdayaan. Pengelolaan sumber daya alam yang ada tentu didorong dengan pengetahuan warga dalam arti persoalan pendidikan dan pengetahuan perlu diutamakan dalam melaksanakan setiap program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan warga kurang memiliki pengetahuan yang baik tentu sangat berpengaruh terhadap kemajuan atau perubahan pada masyarakat setempat. Setiap pihak-pihak yang terlibat baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai warga biasa dapat dikomunikasikan dengan baik dan komunikasi pembangunan tentu dirancang sebelum kegiatan terlaksana hingga selesai kegiatan sehingga komunikasi dialogis sangat diperlukan dalam proses menerjemahkan kebutuhan dan keinginan warga setempat. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara mendalam dengan warga "*Torang masyarakat Mosso banyak tidak bersekolah, hanya sedikit saja yang bersekolah. Mereka lebih banyak bertani, dan berburu babi di hutan.*" Jadi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dilihat pada setiap pertemuan masyarakat di kantor desa. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam setiap pertemuan yang dilakukan aparat

kampung. Akan tetapi, kontribusi masyarakat hanya sebatas mengikuti dan tidak berdasarkan partisipasi ide dan gagasan dari masyarakat yang berkaitan dengan keadaan yang dialami masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan diperlukan bagaimana ide dan gagasan dari masyarakat diintegrasikan dalam keputusan yang utuh. Selama ada kegiatan dan diundang, tentu mereka datang memenuhi undangan pertemuan. Untuk pertemuan itu, masyarakat banyak datang sampai ada yang duduk di luar. Namun setiap pertemuan masyarakat pasif atau hanya diam dan mendengar. Setelah itu, mereka pulang, mereka tidak ajak untuk berdiskusi walaupun mereka diajak. Adanya keterbatasan pengetahuan dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Akan tetapi paling tidak dari kepala kampung bisa mengajak warga berkomunikasi dengan berbagai pendekatan yang dirasa warga mudah dipahami. Namun kenyatannya, komunikasi bersifat monolog atau satu arah. Artinya hanya dari kepala kampung dan aparat kampung saja yang mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Namun tidak membangkitkan pengetahuan warga untuk bertukar pikiran, masyarakat di kampung Mosso lebih banyak mendengar. Setelah rapat dengan pihak pendamping torang pulang. Masyarakat menghadiri pertemuan menganggap ada penerimaan bantuan dari pemerintah sehingga partisipasi masyarakat untuk mendapat bantuan. Pihak aparat kampung tidak mengkomunikasikan pemanfaatan dana desa secara utuh kepada masyarakat.

2. Peran Komunikasi Kepala Kampung

Peran komunikasi kepala kampung sangat menentukan dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Dari hasil kutipan wawancara dengan informan tersebut dapat dibuktikan, bahwa setiap tahapan komunikasi tidak dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi persuasif yang seharusnya bisa dilakukan, semisal pendekatan dialog, pendekatan dialog secara kekeluargaan. Artinya pihak pendamping dalam hal ini aparat kampung/desa bisa mengajak masyarakat yang dianggap paham di lingkungan masyarakat Mosso untuk berdialog, paling tidak warga merasa percaya diri saat berkomunikasi jika ada orang yang diyakini sebagai orang yang bisa memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan jika partisipasi masyarakat tidak menjadi suatu masalah. Maka dapat menghambat proses jalannya pembangunan (Syarifuddin, 2018). Berkaitan dengan pembangunan, maka diperlukan peran aktif keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan melalui partisipasi langsung masyarakat dalam mendorong kelancaran proses pembangunan (Noor Efni Salam, 2024).

Di sini perlu aparat kampung sebagai penghubung dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan program pemberdayaan dimaksud kepada masyarakat (Setyowati et al., 2019b). Untuk memahami karakteristik individu dari warga Mosso dengan baik, diperlukan strategi komunikasi yang dapat membuat masyarakat mudah memahami dan bisa termotivasi. Aparat kampung kurang memiliki proteksi yang baik dalam menjalankan program pemberdayaan (Suswanto et al., 2019). Padahal program pemberdayaan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat perbatasan dan juga sebagai media komunikasi untuk memberikan dampak kemajuan baik dalam pengembangan program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun tidak dilaksanakan dengan baik. Tentu semua ini dibutuhkan komunikasi yang baik dalam melaksanakan program pemberdayaan (Setyowati, 2016). Nasor (2015) sejalan dengan pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan bertahap dalam menciptakan kemandirian masyarakat yang bisa memahami dan mengatasi masalahnya berdasarkan pengetahuannya atas proses yang dialami (Tri Wahyuvi et al., 2020).

Potensi partisipasi warga tergolong rendah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa disebabkan kurangnya perhatian pemerintahan kampung dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Indah Mulyani (2017) dengan judul penelitian "*Peran Komunikasi dalam membangun Energi Sosial Masyarakat Papua*" memperoleh hasil penelitian, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Jayapura dalam program pemberdayaan tergolong rendah, pengambilan keputusan lebih banyak bersumber dari tokoh masyarakat yang dianggap masyarakat sebagai keterwakilan mereka, seperti *Ondo Afi* (kepala suku). Akan tetapi pada penelitian ini terdapat minimnya partisipasi masyarakat kampung Mosso dalam program pemberdayaan disebabkan komunikasi yang dibangun oleh pemerintahan kampung dengan masyarakat tidak efektif, masyarakat, tidak diberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, proses pendampingan tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Sesuai fakta di lapangan bahwa peran aparat kampung tidak maksimal dalam mengelola komunikasi dengan pelaku program pemberdayaan, Masyarakat diajak berkomunikasi pada setiap pertemuan atau pada saat pengawasan dilapangan tentu warga membutuhkan komunikasi dialogis. Artinya warga diajak berdiskusi dan bertukar pikiran terkait program pemberdayaan. Namun faktanya, hampir setiap pertemuan dengan warga Mosso. Peran aparat kampung/desa yang posisinya sebagai komunikator atau fasilitator program tentu mampu memahami kondisi warga dengan baik. Akan tetapi faktanya komunikasi yang dibangun pada setiap pertemuan, hanya bersifat monologis, kemas pesan yang disampaikan juga tidak bisa memantik semangat para pelaku program pemberdayaan untuk berdiskusi. Padahal dukungan dana desa sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Papua yang berada di daerah perbatasan. Mereka merasa kebijakan pemerintah sangat membantu dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat perbatasan. Dukungan pemerintah itu melalui alokasi dana desa yang dibagi ke beberapa bidang, seperti pada bidang infrastruktur yakni pembuatan jalan di dalam kampung, pembangunan perumahan, pembuatan MCK. Sementara pada bidang UKM di kampung Mosso, masyarakat diberdayakan dengan usaha tani (berkebun) dan memelihara ternak dan usaha pemberdayaan lain. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat tidak diberdayakan secara maksimal, baik melalui proses pendampingan program, pelatihan, maupun lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan Roger bahwa fase pengetahuan berlangsung tatkala adopter mendapatkan terpaan pengetahuan dan dampak dari inovasi yang diberikan (Hadiyanto, 2020; Surahmat & Rismayanti, 2022).

Melalui wawancara dengan sumber informan Agus Wepa Voa sebagai warga kampung Mosso dan ketua Badan Usaha Milik Kampung Mosso, dalam hasil kutipan wawancaranya, “dukungan program dari pemerintah itu dana desa yang kami terima tiap tahun dan dana itu biasanya dibagi ke infrastruktur jalan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kalau untuk program pemberdayaan Masyarakat, sudah diberikan. Tetapi hasilnya tidak ada. Berdasarkan data yang dihimpun, menunjukkan aparat kampung tidak mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, proses sosialisasi, hingga pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok pemberdayaan tidak berjalan sesuai direncanakan. Peran komunikasi kepala kampung sangat menentukan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa. Komunikasi efektif terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi (Nugraha et al., 2019; Yunus, 2016). Masyarakat Mosso memerlukan proses pendampingan yang terencana. Padahal dukungan bantuan pemberdayaan masyarakat perbatasan yang diberikan untuk semua masyarakat kampung Mosso yang diberikan per-kepala keluarga “Diberikan kepada per kepala keluarga. Itu sesuai kesepakatan masyarakat.” Dari bantuan pemberdayaan masyarakat didukung oleh semua stakeholder, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Terdapat beberapa tipologi partisipatif masyarakat yang dapat dianalisis dalam memahami masyarakat kampung Mosso (Rani, 2016; Sulistiani Indah, 2017) yakni 1) *Passive participation*, masyarakat hanya diberitahu tentang apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Kondisi masyarakat Mosso sesuai data yang

ditemukan bahwa pemerintah kampung sering meneruskan informasi dari pemerintahan distrik atau pemerintah daerah yang sifatnya informatif sehingga masyarakat sudah malas untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya ketika diajak berpartisipasi pada setiap pertemuan, 2) *Participation in information giving*, masyarakat diminta pandangan namun masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam setiap pertemuan. Dengan demikian, kepala kampung sering kesulitan memahami pikiran masyarakat Mosso sendiri, 3). *Participation consultation* (Pembangunan et al., n.d.), dalam konteks ini masyarakat yang sering ikut berpartisipasi dalam pertemuan dan ketika memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan yang dibicarakan dalam pertemuan. Namun pikiran dan pandangan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 4) *Participation for material incentives* (Nurjanah, 2019), masyarakat Mosso memang sering berpartisipasi dalam bentuk tenaga, material, dan lainnya. Akan tetapi, itu hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Mosso. 5) *Functional* (Kurniawan & Hariyanti, 2022) *participation* (Widya Syukrona et al., 2023), masyarakat Mosso berpartisipasi tidak secara keseluruhan atau bahkan dalam bentuk kelompok-kelompok. Tetapi cenderung pribadi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan proyek atau program pemberdayaan dalam bentuk apapun sehingga di sini diperlukan strategi komunikasi partisipatif untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat sebab masyarakat tidak dipahami tujuan dan kebutuhan utamanya. Maka masyarakat cenderung melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan diri mereka sendiri. Keterlibatan tersebut datang setelah keputusan besar telah dibuat karena setiap tahapan program tidak dilibatkan dalam tahapan perencanaan, 6) *Interactive participation* (Firdaus et al., n.d.),

masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi, berbeda dengan masyarakat Mosso. Ketika ada keterlibatan masyarakat dalam proses mendiskusikan masalah yang dibicarakan pada pertemuan warga, jarang sekali memberikan analisis yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Masyarakat cenderung apatis dalam setiap pertemuan. 7). *Self Mobilization* (Sutopo, 2016), partisipasi masyarakat dipengaruhi atas dasar kondisi yang dialami dan tidak terselesaikan secara institusional. Akan tetapi, kehendak pribadi tanpa perencanaan yang direncanakan pemerintahan kampung. Dengan adanya persoalan seperti ini, perlu ada perhatian pemerintahan kampung dalam mengkomunikasikan ini dengan baik agar masyarakat tidak mengambil keputusan atau inisiatif sendiri dalam mengatasi suatu permasalahan apalagi berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan dan memberikan dampak pada kemajuan Pembangunan. Dalam hal ini, berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Strategi komunikasi kepala kampung dalam pemberdayaan masyarakat pada kampung Mosso perbatasan RI-PNG melalui pemanfaatan alokasi dana desa tidak sesuai yang diharapkan masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, komunikasi yang dibangun hanya bersifat instruksional, dan lemah proses pendampingan melalui pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memahami pelaksanaan kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat terbatas pada pelaksanaan program yang bersifat umum, seperti pembangunan jalan, pembangunan kantor desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat tidak dikomunikasikan dengan baik.

Strategi komunikasi kepala kampung dalam mengkomunikasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat hanya bersifat prosedural dan kekuatan komunikasi dialogis kepada masyarakat terbatas pada kalangan tertentu. Namun pada masyarakat Mosso pada umumnya tidak dilakukan secara maksimal. Perlu adanya ruang-ruang dialog yang dibangun oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Melalui penelitian ini, diperlukan proses pembinaan oleh pemerintah daerah kepada kepala kampung yang ada di daerah perbatasan melalui kegiatan bimbingan teknis sehingga target pemerintah untuk menghadirkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan produktivitas ekonomi pada masyarakat perbatasan dapat teratasi dengan baik melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apris Martin¹, D. M. (2022). Strategi Komunikasi Dinas Sosial Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Berkebutuhan Di Kabupaten Nagan Raya. *Junral Inovasi Penelitian*, 5689–5694.
- Basita Ginting Sugihen, I. S. S. N. P. dan. (2017). Peran Komunikasi Dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat Di Papua. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 18(1), 43.
<https://doi.org/10.31346/jpikom.v18i1.915>
- Damsuki, A. (2019). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Implementasi Program PKKPP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2018 di Desa Tambakselo, Grobogan). *An-Nida : Jurnal Komunikasi*

- Islam*, 11(1), 57–68.
<https://doi.org/10.34001/an.v11i1.936>
- Fikruzzaman Daden. (n.d.). *Strategi Komunikasi Aparat Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Desa Cinangka Kecamatan Ciampea)*.
- Firdaus, M., Awza, R., & Riau, U. (n.d.). *MODEL PENGELOLAAN Komunikasi Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Di Kawasan Pariwisata Rupert Utara*.
- Hadiyanto. (2020). *Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan*.
- Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat* (T. P. S. F. D. B. A. K. D. H. W. C. S. D. I. Wilson Nadeak (Kordinator), Ed.; Ke 2).
- Juditha, C. (2020). DAMPAK Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa (Studi Di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(2), 131. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.2660>
- Kurli, A., Haris, R. A., Syafriyani, I., Sari, R. P., Putri, P. V., & Riady, R. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran Kelompok Tani Rubaru dalam Meningkatkan Penjualan Bawang Merah sebagai Komoditi Unggulan Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(1), 28–45. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i1.956>
- Kurniawan, A. P., & Hariyanti, P. (2022). Pemberdayaan Komunikasi pada Masyarakat Desa Wisata Kinahrejo Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol2.iss1.art2>
- Mustaqbirin, N., Rahmanto, A. N., Sudarmo, N., & Sudarmo, N. (2020). Media Sosial Sebagai Ruang Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Transportasi. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(1), 71. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i1.2929>
- Noor Efni Salam, Y. M. F. R. A. E. E. L. (2024). Komunikasi Pariwisata Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(1), 158–174. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i1.1007>
- Nugraha, A. R., Perbawasari, S., Zubair, F., & Novianti, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Komunikasi Efektif Berbasis Potensi Wisata dan Kearifan Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 123. <https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3546>
- Nurjanah, P. DI. (2019). *Komunikasi pariwisata dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa wisata kecamatan bantan*.
- Pariwisata Budaya, K. (n.d.). *Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kampung wisata tablanusu kabupaten jayapura provinsi papua*.
- Pembangunan, K., Membangun, P., Wisata, O., Peningkatan, T., & Masyarakat, E. (n.d.). *This work licensed under an Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)*. 10(2), 42–53. Retrieved February 28, 2024, from [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol110\(2\).9323](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol110(2).9323)
- Rakhmadani, R. (2021a). Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pengembangan Desa Wisata Sajen Edu Adventure melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(1), 33–44. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i1.159>
- Rakhmadani, R. (2021b). Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pengembangan Desa Wisata Sajen Edu Adventure melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(1), 33–44. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i1.159>
- Ramainim Saragih dan Sarwititi Agung. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah

- Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). *REFORMASI*, 7(1). <https://doi.org/10.33366/RFR.V7I1.698>
- Rani, S. (2016). Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(29), 45–53.
- Setyowati, Y. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “Kampung Preman” dalam Proses Pemberdayaan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.96>
- Setyowati, Y., Tinggi, S., Masyarakat, P., & Apmd, D. ". (2019a). *Komunikasi Pemberdayaan Sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia Empowerment Communication as a New Perspective of Education Development for Development Communication in Indonesia* (Vol. 17, Issue 2).
- Setyowati, Y., Tinggi, S., Masyarakat, P., & Apmd, D. ". (2019b). *Komunikasi Pemberdayaan Sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia Empowerment Communication as a New Perspective of Education Development for Development Communication in Indonesia* (Vol. 17, Issue 2).
- Sulistiani, Indah, Sugihen 1sekolah Pascasarjana, G., Pertanian Bogor, I., Manusia, F. E., Pertanian, I., Kamper, B. J., & Barat, J. (2017). Peran Komunikasi dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat di Papua. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 18(1), 43–56. <https://www.neliti.com/publications/231025/>
- Sulistiani Indah. (2017). *Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yayasan Barcode.
- Surahmat, A., & Rismayanti, R. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Difusi Teknologi Pengolahan Limbah Air (Studi Kasus IPAL Dusun Giriharja dan Biotoilet SDN Babakan Sinyar). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(02), 155–168. <https://doi.org/10.46937/20202241222>
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60. <https://doi.org/10.20884/JUSS.V2I2.1528>
- Sutopo, D. S. (2016). Model pemberdayaan wanita pada sekolah perempuan desa Kota Batu Jawa Timur. *Palastren.*, 9(1), 99–118.
- Tri Wahyuvi, N., Kriyantono, R., & Zulkarnaen. (2020). POLA Komunikasi Pembangunan Terkait Pengelolaan Program Inovasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal heritage*, 8(2), 92–106. <https://doi.org/10.35891/heritage.v8i2.1940>
- Veplun, D. (2019). Perubahan Sosial Masyarakat di Kampung Skouw Sae Distrik Sae Muara Tami Kota Jayapura Papua. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Papua*, 1(2), 47–54.
- Widya Syukrona, Pohan, S., & Iskandar Zulkarnain. (2023). Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Perbedaan Budaya Peserta Magang Internasional Pada Program AIESEC. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 9(2), 121–129. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v9i2.10408>
- Yasir. (2021). Komunikasi pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9, 108–120.
- Yunus. (2016). Perencanaan Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 1–15.